

**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH/LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayah-nya jualah kami telah berhasil menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2021 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

LKPJ dan LPPD ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Gubernur Kalimantan Selatan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

LKPJ dan LPPD ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan umumnya pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Banjarbaru, Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kalimantan Selatan,

**Ir. H. NAFARIN, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19620513 198903 1 011

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....</b>	<b>1</b>
1.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	1
1.2 Kebijakan Strategis yang Dilaksanakan.....	5
1.2.1 Isu Strategis Organisasi .....	5
1.2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2021 .....	7
1.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).....	11
1.4 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).....	13
1.5 Capaian Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	13
1.6 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah .....	19
1.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya .....	31
1.8 Permasalahan dan Solusi .....	31
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN (DEKONSENTRASI) .....</b>	<b><u>36</u></b>
2.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi .....	36
2.1.1 Target Kinerja dan Realisasi .....	36
2.2 Permasalahan dan Kendala .....	38
2.3 Saran dan Tindak Lanjut.....	38
<b>BAB III URUSAN DESENTRALISASI .....</b>	<b><u>39</u></b>
3.1 Standar Pelayanan Minimal .....	39
3.2 Alokasi Anggaran.....	39
3.3 Realisasi Anggaran .....	39
3.4 Dukungan Personil .....	45
3.5 Permasalahan dan Solusi .....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b><u>49</u></b>
<b>BAB V LAMPIRAN.....</b>	<b><u>50</u></b>

## DAFTAR TABEL

Permasalahan Pelayanan Skpd Dan Pendorong .....	7
Kondisi, Tujuan, Sasaran, Startegi, dan Arah Kebijakan Program dan Kegiatan.....	10
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (OUTPUT).....	11
Indikator Kinerja Kunci Hasil (OUTCOME).....	13
Indikator dan Target.....	14
Indikator Kinerja Daerah.....	14
Sasaran Strategis .....	15
Indikator Kinerja, Target, dan Realisasi 2020 & 2021 .....	16
Rekapitulasi Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	19
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 BKPM RI.....	36
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 Kemendagri.....	37
Realisasi Anggaran Belanja Langsung .....	39
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	46
Komposisi Pegawai Berdasar Pangkat Golongan .....	46
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan fungsional .....	47

# **BAB I**

## **CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **1.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2021 melaksanakan sebanyak 6 (enam) program pembangunan yang terdiri dari 1 (satu) program rutin (kesekretariatan) dan 5 (lima) program Urusan Penanaman Modal sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal; Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Adapun Program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Namun untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Pada tahun anggaran 2019, DPMPTSP Prov.Kalsel melaksanakan 6 (enam) Program yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan serta 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Adapun Tingkat pencapaian program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021 sebesar 87,2% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub. Kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (fisik) 100,00%
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (fisik) 100,00%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (fisik) 100,00%
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (fisik) 100,00%
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100,00%
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (fisik) 100,00%
  - Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan (fisik) 100,00%
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan (fisik) 0,00%
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (fisik) 100,00%
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (fisik) 100,00%
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (fisik) 100,00%
  - Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan (fisik) 100,00%
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (fisik) 100,00%
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (fisik) 100,00%
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (fisik) sebesar 91,09% dengan sub. Kegiatan:
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (fisik) 100,00%
  - Pengadaan Mebel (fisik) 100,00%
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (fisik) 100,00%
6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
- Penyedia Jasa Surat Menyurat (fisik) 100,00%
  - Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (fisik) 100,00%
  - Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (fisik) 100,00%
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (fisik) 100,00%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (fisik) 100,00%
- Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (fisik) 100,00%

## **2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021 sebesar 83,98% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
  - Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (fisik) 100,00%
  - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (fisik) 100,00%
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
  - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (fisik) 100,00%
  - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi fisik) 100,00%

## **3. Program Promosi Penanaman Modal**

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021 sebesar 88,65% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
  - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi (fisik) 100,00%

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (fisik) 100,00%

#### **4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021 sebesar 85,08% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
  - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (fisik) 100,00%.
  - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.
  - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (fisik) 100,00%.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (fisik) 100,00%.

#### **5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021 sebesar 67,73% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub.kegiatan:
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.



## **6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021 sebesar 87,19% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi(fisik) sebesar 100,00% , dengan sub. Kegiatan:
  - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (fisik) 100,00%.

## **1.2 Kebijakan Strategis yang Dilaksanakan**

### **1.2.1 Isu Strategis Organisasi**

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran kondisi yang ada sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian global mengalami perlambatan ekonomi
2. Recovery pemulihan perekonomian akibat pandemi
3. Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan
4. Pelaksanaan pelayanan publik terkait perizinan dan non perizinan
5. Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibukota negara.

Adapun beberapa permasalahan umum yakni:

1. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik
2. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :
  - a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
  - b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi

- c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
- d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dari tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;
2. Masih sedikit identifikasi data potensi daerah;
3. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
4. Belum optimalnya promosi investasi;
5. Ketidakmerataan penanaman modal;
6. Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
7. Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Menuju pelayanan prima;
9. Terbatasnya sumber daya manusia;
10. sarana dan prasarana belum optimal;

11. sistem informasi pelayanan belum optimal;
12. Keterbatasan Anggaran.

**Tabel Permasalahan Pelayanan SKPD dan Pendorong**

Permasalahan Pelayanan SKPD	Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya promosi investasi</li> <li>- Belum teridentifikasinya data potensi daerah</li> <li>- Ketidakmerataan penanaman modal</li> <li>- Pelayanan belum optimal</li> <li>- Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM.</li> <li>- Data PMA/PMDN tidak sinkron antara pusat, provinsi dan kab/kota</li> <li>- Sinkronisasi Perencanaan</li> <li>- Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kejelasan visi jangka panjang Kalimantan Selatan</li> <li>- Ketersediaan lahan dan komoditi unggulan</li> <li>- Kondusifnya situasi sosial masyarakat dan keamanan</li> <li>- Wilayah bebas dan ancaman gempa bumi dan letusan gunung merapi</li> <li>- Kesiapan kelembagaan penanaman modal</li> <li>- Kesiapan aparatur pemerintah yang berkomitmen</li> </ul>

### **Penentuan Isu-isu Strategis**

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan lima tahun ke depan adalah:

1. Belum optimalnya investasi di Kalimantan Selatan; dan
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

### **1.2. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2021**

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif

akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

**“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan), Lebih Sejahtera,  
Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing ”**

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil;
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik;
3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal;
4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya; dan
5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

#### **Tujuan dan Sasaran SKPD**

Dalam menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari setiap misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 mengacu pada Misi 5.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut:



**Kondisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Program dan Kegiatan**

<b>KONDISI AWAL DAN ISU</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM /KEGIATAN</b>
<p><b><u>Kondisi</u></b></p> <p>1. Kondisi perekonomian global mengalami perlambatan ekonomi</p> <p>2. Recovery pemulihan perekonomian akibat pandemi</p> <p>3. Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan</p> <p>4. Pelaksanaan pelayanan publik terkait perizinan dan non prizinan</p> <p>5. Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibukota negara.</p> <p><b><u>Isu</u></b></p> <p>1) Belum optimalnya investasi di Kalsel</p> <p>2) Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan</p>	<p><b><u>Tujuan</u></b></p> <p>✓ Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing perekonomian</p> <p><b><u>Sasaran</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kontribusi sektor industri, perdagangan, dan jasa serta</li> <li>• Meningkatkan Investasi dalam Aktifitas Perekonomian.</li> </ul> <p><b><u>Strategi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan investasi baik industri kecil maupun besr</li> </ul>	<p>1. Peningkatan Investasi:</p> <p>a) meningkatkan peran dan kinerja penanaman modal untuk menarik investor.</p> <p>b) Monev dan analisis dalam rangka menghimpun informasi permasalahan investasi</p> <p>c) Mengkoordinasi permasalahan investasi, untuk diclearkan atau minimal dikurangi.</p> <p>d) Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalsel.</p> <p>e) Membuat Rencana Tindak Peningkatan Investasi di Kalsel.</p> <p>2. Meningkatkan peran dan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk peningkatan kualitas dan kemudahan perizinan di Kalsel</p>	<p>1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ::</p> <p>a) Penetapan Pemberian Fasilitas /Intensif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</p> <p>b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</p> <p>2. Program Promosi Penanaman Modal</p> <p>a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi</p> <p>3. Program Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>a) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</p> <p>5. Program Pengelolaan</p>

KONDISI AWAL DAN ISU	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN
			Data dan Sistem informasi Penanaman Modal a) Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

### 1.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Berdasarkan dari IKK Provinsi Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Kunci keluaran (Output) terdiri dari :

No	IKK OUTPUT	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
<b>Urusan Penanaman Modal</b>				
1	Perda mengenai pemberian fasilitas / insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang tentang Fasilitasi Penanaman Modal Di Provinsi Kalimantan Selatan</li> <li>- Peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Investor</li> <li>- Peraturan daerah Kabupaten Tabalong nomor 4 tahun 2011 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman</li> </ul>		Daftar terlampir

No	IKK OUTPUT	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
		Modaldi Kabupaten Tabalong		
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	✓ Draft SOP Insentif Kemudahan Pemberian Fasilitas/insentif	- draft	
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	✓ Laporan Evaluasi Insentif/Kemudahan Berusaha	1 laporan	
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rapat koordinasi potensi investasi Kalimantan Selatan</li> <li>✓ Forum Investasi</li> <li>✓ One on one meeting investor dan UMKM</li> </ul>	3 kali	Daftar kegiatan terlampir
5	Kegiatan pameran penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pameran Jiattex Expo</li> <li>✓ Pameran Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2021</li> <li>✓ Door To Door Promosi : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT. Jhonlin Group</li> <li>➤ PT. Adaro Indonesia</li> </ul> </li> </ul>	3 Kali	Daftar kegiatan terlampir
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Promosi Investasi dan Fasilitasi Perusahaan	3 Kali	Pendampingan Investor bersama BKPM RI (Sydney)
7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Tersedianya sarana dan prasarana konsultasi dan pegaduan ; terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Secara tatap muka 1.398 kali</li> <li>✓ Secara online 139 kali</li> </ul>	Bukti terlampir
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Perizinan Penanaman modal digantikan dengan perizinan Berusaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ NIB</li> <li>✓ Perizinan sesuai kewenangan provinsi</li> </ul>	Jumlah Penerbitan : 1.227 NIB: 7.297 Perizinan: 690 Izin	Data terlampir



No	IKK OUTPUT	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
9	Laporan realisasi penanaman modal	Tersedia pers rilis investasi tahun 2021  PMDN : Rp11 T PMA : Rp1.71T <b>Total : Rp 12,71 T</b>	1 laporan	Data terlampir
10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten / kota	Terlaksananya Bimtek penanaman modal kepada aparat penanaman modal provinsi dan kab/kota	18 Kali	Data terlampir
11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Terlaksananya Bimtek/sosialisasi kepada PMA dan PMDN di Kalimantan Selatan	9 kali	Bukti / Data terlampir
12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi	Tersedia pada website, dan Simapan	2 media	Bukti terlampir

#### 1.4 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

**Indikator Kinerja Kunci keluaran (Outcome) terdiri dari :**

Nomor	IKK OUTCOME	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	Realisasi Investasi 2020 sebesar Rp 7,7 T Realisasi Investasi 2021 sebesar Rp12,71 T Meningkat sebesar <b>63,93%</b> dar tahun sebelumnya	117,405%	FC Daftar rincian realisasi PMDN tahun 2020 dan 2021 pada <b>Triwulan IV</b> ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

#### 1.5 Capaian Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, Sasaran utama penanaman modal yang ingin dicapai pada tahun 2021 yakni peningkatan investasi dan nilai IKM. kemudian ditetapkan 5 (lima) program prioritas urusan penanaman modal beserta Indikator dan targetnya sebagai berikut:

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target		(Juta. Rp)
Urusan Penanaman Modal																
Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp	5,4 T	7,1 T	1.640	8,1 T	1.968	9,2 T	2.362	10,5 T	2.834	12 T	3.401	10,83 T	4.082	10,83 T
Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	14.81	B (75)	350	B (77,50)	1.500	B (80)	1.861	B (82,50)	1.952	B (85)	2.343	B (85)	2.821	B (85)

Selanjutnya ditetapkan juga indikator kinerja daerah pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	5.4	7,1	8,1	9,2	10,5	12	10,83

Target realisasi investasi PMA dan PMDN adalah sebesar Rp10,83 triliun. Selain itu juga ditargetkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan predikat B (nilai 85).

#### Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan ditentukan oleh seberapa jauh tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori capaian kinerja dengan rentang capaian sebagai berikut:

- a. Lebih dari 90% untuk kategori capaian Sangat Memuaskan;
- b. 80% s/d 90% untuk kategori capaian Memuaskan;
- c. 70% s/d 80% untuk kategori capaian Sangat Baik;
- d. 60% s/d 70% untuk kategori capaian Baik;
- e. Diatas 50% s/d 60% untuk ketegori capaian Cukup;
- f. Kurang dari 50% untuk kategori capaian Kurang.

Sasaran strategis dan indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis :</b>  <b>Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa serta Meningkatkan Investasi dalam Aktifitas Perekonomian</b>	<b>Peningkatan Investasi dengan indikator :</b> <b>1. Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)</b>
	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator :</b> <b>2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan 2 (dua) indikator didalamnya, dimana salah satunya menjadi indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026.

Dalam perencanaan program kerja tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Kelompok indikator input terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Sedangkan indikator output merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya.

Indikator outcome merupakan indikator yang terbentuk karena adanya output, yang bisa berupa pemanfaatan ouput yang dapat diukur dalam jangka pendek (intermediate outcome). Untuk menilai atau mengukur capaian kinerja, menggunakan tolok ukur indikator sasaran yang melekat pada kegiatan.

Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Peningkatan Investasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan 2 (dua) indikator yakni: Realisasi Investasi PMA dan

PMDN dan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM). Realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2021 dengan capaian sampai Triwulan IV adalah **117,405%\*\*** meningkat sebesar **63,93%** dibandingkan tahun 2020 sehingga masuk dalam klarifikasi Sangat Memuaskan. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 105.00%\*\* juga masuk dalam klarifikasi sangat memuaskan.

#### **Indikator Kinerja, Target, dan Realisasi 2020 & 2021**

No	Indikator Kinerja	Target 2020 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Realisasi 2021 dan % capaian
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	12.000.000.000.000	7,756,307,320,000 (64,64%)**	10.830.000.000.000	12.715.020.000.000 (117,405%)**
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (85)	A (88.35) 103.94%	B (85)	A (89.25) 105.00%

Pada indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN ditargetkan sebesar **10.83 triliun rupiah**. Adapun realisasinya sampai pada **Triwulan IV** sebesar **12,71 triliun rupiah**, sehingga kinerja mencapai **117,405%**.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan **B dengan nilai 85**. Adapun realisasinya adalah **A dengan nilai 89,25**, sehingga kinerja mencapai **105%**.

Indikator DPMPTSP (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 pada urusan penanaman modal yakni: Realisasi Investasi dengan target **12,71** triliun rupiah.

Capaian realisasi investasi pada tahun 2021 sebesar **12,71** triliun rupiah atau **117,405%** sampai pada **Triwulan IV**. Realisasi investasi telah tercapai masuk kedalam klasifikasi sangat memuaskan dengan target yang telah ditetapkan. Disisi lain juga rencana investasi atau sering disebut juga dengan minat investasi (berdasarkan persetujuan/Izin prinsip/tanda daftar) mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan iklim investasi khususnya di Kalimantan Selatan semakin diminati dan bertumbuh kembang. Dengan kata lain Investor berminat untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dilakukan dengan melaksanakan analisis survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan langkah sebagai berikut:

- Menyediakan kotak saran, ruang pengaduan dan kuesioner survey Kepuasan Masyarakat;
- Diselesaikannya aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan;
- Pembagian kuesioner kepada pelanggan

Upaya selanjutnya untuk pencapaian target Realisasi Investasi sebagai berikut :

1. Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD dan Dekonsentrasi APBN
2. Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
4. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
5. Promosi Investasi yang berkelanjutan, antara lain : pameran investasi, forum investasi, one-one meeting, dan lainnya.
6. Matchmaking dalam rangka kemitraan dunia usaha.
7. Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi
8. Inovasi SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin), agar izin yang semula tidak masuk skema penanaman modal menjadi masuk dari bagian penghitungan investasi, sehingga dapat memacu peningkatan realisasi investasi.
9. Gerai pelayanan perizinan di daerah dalam rangka memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan.
10. Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
11. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur)
12. Peningkatan Standar Pelayanan dengan implementasi SMM ISO 9001:2015.

Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 pada urusan penanaman modal yakni: Realisasi Investasi dengan target 10.83 triliun rupiah, sasaran RPJMD sama dengan capaian kinerja eselon II.

Capaian realisasi investasi pada tahun 2021 meningkat sebesar 12,71 triliun rupiah atau 117.405% dari target tahun 2021 sebesar 10,83 Trilyun. Walaupun masih terkendala akibat Covid 19 sehingga masih ada beberapa perusahaan yang menunda realisasi investasinya.

Disisi lain, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator pengukur kepuasan masyarakat yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 yaitu 89,25, sedangkan tahun 2020 sebesar 88.35 dengan predikat A sesuai Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan:

1. Penyesuaian persyaratan, spesifikasi, dan biaya/tarif yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan lingkup pemerintah provinsi kepada DPMPTSP Prov.Kalsel sebanyak 18 bidang dan 145 jenis perizinan dan nonperizinan.
3. Pengelompokkan prosedural pengurusan perizinan dan nonperizinan menjadi 3 (tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP): 1. Dengan pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan, 2. Tanpa pertimbangan teknis dengan peninjauan lapangan, dan 3. Tanpa pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan. Prosedural yang dibuat adalah untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam berurusan. Telah dilakukan pemangkasan proses untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat.
4. Konsistensi implementasi maklumat pelayanan yang menyatakan bahwa aparat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik, dan apabila tidak ditepati, siap menerima sanksi yang berlaku.
5. Reward petugas pelayanan terbaik
6. Penyediaan dan Penambahan tenaga Front Officer
7. Tersedianya Help Desk
8. Implementasi perizinan secara online dengan Sistem Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN) dan Online Single Submission (OSS)
9. Digital Signature untuk percepatan dan kemudahan perizinan nonperizinan.

10. Pembentukan Satuan Petugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kalimantan Selatan serta keaktifan didalamnya

11. Implementasi ISO 9001:2015

## 1.6 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar - benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna perjanjian kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Secara rinci, rekapitulasi penetapan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### Rekapitulasi penetapan indikator kinerja utama

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
1	Kepala Dinas	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	10.830.000.000.000	<u>12.715.020.000.000</u> Data Triwulan IV	117.405%	Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
							Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan reliasasi pelaksanaan investasinya.
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (85)	A (89,25)	105,00%	Analisis Survey Kepuasan Masyarakat
2	Sekretaris	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BB (82,50)	A (85,10)	103,15%	Persentase Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP	0,50%	1,25%	249,85%	Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP
		Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang	80,00%	80,00%	100,00%	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan



NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
			dibutuhkan SKPD				SOPD
		Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	100,00%	101,33%	101,33%	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD
			Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	90%	100,00%	111,11%	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham
		Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Aset yang tercatat (harus 100%)	100%	100,00%	100,00%	Persentase Aset yang tercatat (harus 100%)
			Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	90%	86,17%	95,74%	Persentase serapan anggaran SOPD
3	Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)	Menyusun Data Kepegawaian Evaluasi, serta administrasi Kepegawaian SKPD	Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Menyurat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat
			Jumlah Dokumen terkait Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen terkait administrasi kepegawaian
			Jumlah Pegawai yang administrasinya dilayani secara tertib	75 Orang	79 Orang	105,33%	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaian dilayani secara tertib

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
		Melaksanakan Peningkatan Kapasitas SKPD	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	8 Orang	8 Orang	100,00%	Jumlah Peserta Pelatihan / Bimtek yang paham
4	Esselon IV (Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset)	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28	28,94	103,36%	Nilai komponen pelaporan pada LKIP SKPD
			Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14	14,10	100,71%	Nilai komponen perencanaan pada LKIP SKPD
			Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan
		Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala
		Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Persentase aset yang dikelola	1 Set	1 Set	100,00%	Jumlah Aset yang dikelola
5	Esselon III (Kepala Bidang Perencanaan dan	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kemitraan	100%	(8/8)	100%	Jumlah Realisasi Pelaksanaan Kemitraan dibagi Jumlah Kemitraan

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
	Pengembangan Iklim (Penanaman Modal)		Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	100%	100% (20/20)	100%	Dunia Usaha x 100%
			Persentase potensi investasi yang berbasis lingkungan	25%	35% (7/20)	140%	Jumlah Potensi Investasi daerah yang dapat dipromosikan dibagi Jumlah Potensi Investasi di 13 Kab/Kota x 100%
6	Eselon IV (Kasi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal)	Identifikasi Potensi dan Kebijakan Investasi	Jumlah Jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan
			Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100 % (8 sektor)	100% (8 Sektor)	100%	Jumlah Realisasi Sektor Investasi dibagi Jumlah sektor Investasi pada RUPM x 100%
7	Eselon IV (Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha)	Fasilitasi Dunia Usaha dengan Perusahaan PM	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	4 Kemitraan	4 Kemitraan	100,00%	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
8	Esselon III (Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal)	Peningkatan Calon Investor	Persentase Peningkatan Calon Investor	30%	33,33% (4-3)/3	111,11%	Pertumbuhaa Calon Investor = (Jumlah calon investor tahun bejjalan dikurang jumlah calon investor tahun lalu) dibagi jumlah calon investor tahun lalu x 100%
			Persentase Promosi yang ditindaklanju ti	25%	25% (5 Promosi)	100,00%	Promosi yang ditindaklanju ti dibagi jumlah romosl an dilaksanakan x 100%
9	Esselon IV (Kasi Pengemban gan Promosi Penanaman Modal)	Identifikasi Promosi Investasi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	3 Kali	3 Kali	100,00%	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, One on One Meeting
			Jumlah Item Media Promosi Investasi	6 item	6 item	100,00%	Jumlah item Media Promosi
10	Esselon IV (Kasi Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal)	Peningkatan Pelaksanaan Promosi Investasi	Persentase Potensi investasi daerah yang diminati	50% (10 Potensi)	50% (10 Potensi)	100,00%	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang Diminati Jumlah Potensi yang dipromosikan

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
							x 00%
			Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali	5 Kali	166,67%	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi
11	Eselon III (Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal)	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perusahaan yang aktif (diawasi/diamati/diketahui) dibagi jumlah Perusahaan Penanaman Modal yang ada di Kalsel x 100%
			Persentase Perusahaan yang Aktif dalam Investasinya	30,00%	32,40%	108,00%	Jumlah penyelesaian permasalahan perusahaan dibagi jumlah permasalahan perusahaan x 100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target	50,00%	46,2%	92,4%	Jumlah Kabupaten/Kota yang Investasi Provinsi dibagi 13 Memenuhi Target Kabupaten/Kota x 100%
12	Eselon IV (Kasi Pengawasan)	Pengawasan PM	Jumlah Perusahaan PM yang lancar	300 Perusahaan	324 Perusahaan	108,00%	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal PMA

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
	Penanaman Modal)		melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)				dan PMDN yang melaksanakan kegiatannya sesuai target Perusahaan
			Laporan Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Laporan Realisasi Penanaman Modal
13	Eselon IV (Kasi Pembinaan Penanaman Modal)	Pembinaan PM	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid tepat waktu	400 Perusahaan	408 Perusahaan	102,00%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu
			Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplem entasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru	100%	100%	100%	Jumlah Kabupaten/Kota yang Telah Mengimplem entasikan Kebijakan Penanaman Modal Terbaru dibagi 13 (Kabupaten/Kota) x 100%
14	Eselon III (Kepala Bidang Perizinan infrastruktur dan Sosial)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	B (85)	A (90.75)	106,76%	Nilai IKM Bidang Infrastruktur dan Sosial
			Persentase Permohonan yang dilayani	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
							Infrastruktur dan Sosial sesuai SOP dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Persentase Usaha Berizin	90%	99.19	110.21%	Jumlah Usaha Berizin dibagi jumlah usaha x 1A}yo
15	Esselon IV (Kasi Perizinan Sosial)	Pelayanan Perizinan Bidang Sosial	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dilayani	20 Jenis Izin	20 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Sosial yang dilayani
16	Esselon IV (Kasi Perizinan Infrastruktur)	Pelayanan Perizinan Bidang Infrastruktur	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan)	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
			Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses sesuai standar pelayanan				diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang Dilayani	35 Jenis Izin	35 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Infrastruktur yang dilayani
17	Esselon III (Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	B (85)	A (88,00)	103,53%	Nilai IKM Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
			Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dilayani dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%



NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
			Persentase Usaha Berizin	90%	99.88%	110.98	Jumlah Usaha Berizin dibagi jumlah usaha x 100%
18	Esselon IV (Kasi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam )	Pelayanan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dilayani	40 Jenis Izin	40 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang dilayani
19	Esselon IV (Kasi Perizinan Ekonomi)	Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan)	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
			Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses sesuai standar Pelayanan				sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi yang Dilayani	50 Jenis Izin	50 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Ekonomi yang dilayani
20	Eselon III (Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi)	Pelayanan Pengaduan dan Informasi	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	B (85)	B (86,75)	102,06%	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan
21	Eselon IV (Kasi Kebijakan, Hukum dan Layanan Pengaduan)	Pelayanan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan x 100%
			Persentase Pemenuhan pelayanan Investor	100%	100%	100%	Jumlah Pelayanan Investor dibagi Jumlah

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
							Permintaan Calon Investor x 100 %
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	100%	100%	100%	Jumlah Pemenuhan Layanan Konsultasi dibagi Jumlah Konsultasi (dari Masyarakat/Pe mohon Ijin) x 100%
22	Eselon IV (Kasi Data dan Informasi)	Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update	2 Sistem	2 Sistem	100,00%	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update (terbaru)

### 1.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Pada anggaran tahun sebelumnya tidak ada rekomendasi yang harus ditindak lanjuti.

### 1.8 Permasalahan dan Solusi

Capaian tahun 2021 sebesar 10,83 Triliyun dan melebihi dari capaian tahun sebelumnya, walaupun masih belum dalam kondisi optimal .

Adapun permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Masih dalam kondisi recovery perekonomian akibat pandemi COVID-19.

2. mengisi LKPM perusahaan adalah pegawai dari Kantor Pusat sehingga menyulitkan koordinasi antara personil DPMPTSP dengan petugas dari Kantor Pusat perusahaan tersebut.
  3. Belum ada sanksi/hukuman bagi Perusahaan yang tidak mentaati kewajiban menyampaikan LKPM sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  4. Kurang maksimalnya kabupaten / kota dalam usaha pencapaian target realisasi investasi sesuai target investasi daerah masing-masing, masih bergantung kepada Provinsi Masih rendahnya kesadaran perusahaan dalam menyampaikan LKPM
- Proyeksi Ekonomi

Ekonomi Indonesia terancam tidak bisa pulih cepat setelah terjadinya pandemi Covid-19. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan keluaran Oktober memproyeksikan pertumbuhannya sepanjang 2020 masih minus 1,5% secara tahunan. Ini lebih dalam dari proyeksi Juni lalu yang tumbuh minus 0,3%. Revisi proyeksi ke arah lebih buruk juga dilakukan Bank Dunia dalam laporan keluaran bulan yang sama. Angkanya antara -1,6% sampai -2%. Padahal, Juli lalu lembaga ini masih memproyeksikan ekonomi negeri ini tumbuh positif 0%. Kedua lembaga tersebut meramal ekonomi Tanah Air akan pulih pada 2021. IMF memproyeksikan sepanjang tahun depan ekonomi tumbuh 6,1%. Sementara Bank Dunia meramalnya akan tumbuh antara 3% sampai 4,4%. Proyeksi tak jauh beda datang dari Office of Chief Economist Group (OCE) Bank Mandiri. Lembaga ini memproyeksikan secara kuartalan (qtoq) ekonomi akan tumbuh melambat pada kuartal III dan IV tahun ini, meskipun lebih baik dari triwulan kedua yang berkontraksi 5,32%. Perkiraan pembalikan ke level pra-Covid-19 pada kuartal II 2021 dengan pertumbuhan 5,15%.

**Solusi :**

1. Mengoptimalkan sosialisasi atau bimtek LKPM secara on- line maupun off-line terhadap perusahaan baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota.
2. Mengoptimalkan koordinasi baik secara off line ataupun online terhadap perusahaan terutama yg laporannya ditangani oleh kantor pusat dengan

meminta bantuan melalui staf/pejabat Direktorat Wilayah II Deputy Dalak BKPM.

2. Mengoptimalkan koordinasi dengan pejabat di DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk bisa lebih baik dalam mengejar target realisasi investasi melalui penyampaian LKPM perusahaan di wilayah Kabupaten/Kota.
3. Memantau LKPM perusahaan yang dikoreksi atau dikembalikan oleh BKPM untuk segera diperbaiki dan disampaikan ulang sampai disetujui menjadi realisasi investasi oleh BKPM.
4. Untuk Triwulan 4 Tahun 2021, melakukan koordinasi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota dengan menunjuk PIC masing-masing Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mengejar perusahaan yang belum pernah menyampaikan LKPM dan mengingatkan perusahaan yang sudah menyampaikan LKPM agar menyampaikan lagi pada triwulan 4, dimana periode pelaporan LKPM nya dimulai pada tanggal 1 – 10 Januari 2022.

Upaya selanjutnya untuk pencapaian target Realisasi Investasi sebagai berikut :

1. Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD dan Dekonsentrasi APBN
2. Himbuan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
4. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
5. Promosi Investasi yang berkelanjutan, antara lain : pameran investasi, forum investasi, one-one meeting, dan lainnya.
6. Matchmaking dalam rangka kemitraan dunia usaha.
7. Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi
9. Gerai pelayanan perizinan di daerah dalam rangka memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan.
10. Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
11. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur)

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan:

1. Penyesuaian persyaratan, spesifikasi, dan biaya/tarif yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan lingkup pemerintah provinsi kepada DPMPTSP Prov.Kalsel sebanyak 18 bidang dan 145 jenis perizinan dan nonperizinan.
3. Pengelompokkan prosedural pengurusan perizinan dan nonperizinan menjadi 3 (tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP): 1. Dengan pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan, 2. Tanpa pertimbangan teknis dengan peninjauan lapangan, dan 3. Tanpa pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan. Prosedural yang dibuat adalah untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam berurusan. Telah dilakukan pemangkasan proses untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat.
4. Konsistensi implementasi maklumat pelayanan yang menyatakan bahwa aparat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik, dan apabila tidak ditepati, siap menerima sanksi yang berlaku.
5. Reward petugas pelayanan terbaik
6. Penyediaan dan Penambahan tenaga Front Officer
7. Tersedianya Help Desk
8. Implementasi perizinan secara online dengan Sistem Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN) dan Online Single Submission (OSS)
9. Digital Signature untuk percepatan dan kemudahan perizinan nonperizinan.
10. Pembentukan Satuan Petugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kalimantan Selatan serta keaktifan didalamnya
11. Implementasi ISO 9001:2015

Disamping itu, dalam rangka untuk mengurangi permasalahan yang ada, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengupayakan beberapa hal sebagai berikut::

1. Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan sinkronisasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. Mengikuti kegiatan/event promosi potensi daerah, baik berupa pameran, Rapat Koordinasi, pertemuan antar BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para investor, dan menggalang kemitraan.
3. Pelaksanaan evaluasi LKPM
4. Melakukan rapat-rapat koordinasi regional guna pemecahan masalah investasi.
5. Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelatihan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.
6. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Melengkapi penyelesaian permasalahan tersebut di atas dengan memanfaatkan Tim TASK FORCE telah diupayakan penyelesaiannya baik Task Force di pusat maupun di daerah. Hal ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tugas dari pada Tim Task Force ini meliputi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh para investor khususnya investor PMA/PMDN.
8. Melakukan rapat-rapat koordinasi guna pemecahan masalah yang terkait dengan stakeholder.

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas, maka strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Kegiatan Langsung yang merupakan bagian dari Rencana Strategik 2016 – 2021 agar benar-benar dapat disusun sesuai kaidah-kaidah yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip-prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif);
3. Pengawasan/pengendalian internal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna;
4. Petugas yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar benar-benar memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

#### 2.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

##### 2.1.1 Target Kinerja dan Realisasi

##### Dekonsentrasi BKPM RI/ Kementerian Investasi

➤ Dasar Hukum

DIPA Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia  
**(BKPM RI)** Nomor 065.01..3.159002/2021

➤ Instansi Dekonsentrasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)

➤ Program dan Kegiatan

Program Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan  
Penanaman Modal Wilayah IV

➤ Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2021 adalah sebesar Rp191.260.000,00 atau 98,29 persen dari anggaran belanja sebesar Rp194.589.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II TA 2021 adalah sebagai berikut:

##### Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

URAIAN	2021		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	194.589.000	191.260.000	98,29 %
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>194.589.000</b>	<b>191.260.000</b>	<b>98,29 %</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	194.589.000	191.260.000	98,29 %

Dana dekonsentrasi yang diturunkan BKPM RI kepada DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk mengawasi perusahaan baik PMA maupun PMDN yang melaksanakan kegiatannya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan target 27 proyek,



adapun pelaksanaannya DPMPTSP dapat merealisasikan sebanyak 27 proyek sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%

### **Dekonsentrasi Kemendagri**

➤ Dasar Hukum

DIPA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 010.04.3.484172/2021 Instansi Dekonsentrasi

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI)

➤ Program dan Kegiatan

Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah

➤ Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2021 adalah sebesar Rp220.660.000,00 atau 98,48 persen dari anggaran belanja sebesar Rp224.055.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II TA 2021 adalah sebagai berikut:

#### **Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021**

URAIAN	2021		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	224.055.000	220.660.000	98,48 %
Total Belanja Kotor	224.055.000	220.660.000	98,48 %
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	224.055.000	220.660.000	98,48 %

Identifikasi dan investarisasi data penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kab/kota se Kalimantan Selatan dengan target 1 rekomendasi kebijakan capaian kinerja 95%.

## 2.2 Permasalahan dan Kendala

- Proses restrukturisasi rekening pemerintah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan No 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga. Dimana ada beberapa kendala dan hambatan dalam proses migrasi dari rekening giro ke rekening virtual, dikarenakan proses tersebut memerlukan koordinasi antara Satker (DPMPTSP), Kementerian/Lembaga (BKPM), Bank Mandiri Pusat (Jakarta) selaku penerbit rekening virtual, serta KPPN Jakarta dan KPPN Banjarmasin.
- Kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan ada beberapa kegiatan yang ditunda karena kebijakan beberapa perusahaan yang tidak mengizinkan kunjungan tamu dari luar. Karena sebagian besar kegiatan satker kami adalah melakukan pemantauan lapangan ke perusahaan PMA/PMDN untuk memantau realisasi investasi. Selain itu ada juga kegiatan konsolidasi data dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota yang tidak memungkinkan terlaksana karena kondisi pandemi covid-19 sekarang ini

## 2.3 Saran dan Tindak Lanjut

- ▣ Dengan penerapan rekening virtual pada tahun anggaran 2021 diharapkan Satker DPMPTSP dapat lebih berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (BKPM), Bank Mandiri Pusat (Jakarta) selaku penerbit rekening virtual, serta KPPN Banjarmasin. Agar proses implementasi rekening virtual dapat berjalan lancar
- Dengan pemberlakuan protokol kesehatan ketat yang diterapkan oleh sebagian besar perusahaan yang hendak di pantau, agar kiranya kegiatan pemantauan lapangan dapat di lakukan melalui platform video conference (Zoom Meeting). Begitu juga dengan kegiatan konsolidasi data dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota agar dapat dilaksanakan melalui video conference (Zoom Meeting).

## BAB III

### URUSAN DESENTRALISASI

#### 3.1 Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 610/9803/Bangda tanggal 20 Desember 2017 tentang pelaporan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana tidak terdapat SPM pada urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### 3.2 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 sebesar Rp15.362.865.342 (100%) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp13.239.095.696 (86,17%). Sedangkan realisasi fisik berupa output kegiatan sebesar 99,39%.

#### 3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Belanja Langsung DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan
						S	R	S	R	S	R	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			11.928.943.442	77,65	100	99,21	100	87,2	11.928.943.442	10.402.611.246	
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			187.307.800	1,22	100	100	100	89,23	187.307.800	167.127.600	
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	3 Dokumen	139.165.800	0,91	100	100	100	85,94	139.165.800	119.599.400	3 Dokumen
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	3 Dokumen	48.142.000	0,31	100	100	100	98,73	48.142.000	47.528.200	3 Dokumen

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan
						S	R	S	R	S	R	
X.XX.0 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.381.194.800	48,05	100	100	100	85,8	7.381.194.800	6.333.070.796	
X.XX.0 1.1.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	7.138.625.000	46,47	100	100	100	85,55	7.138.625.000	6.107.317.396	12 Bulan
X.XX.0 1.1.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	12 Bulan	229.199.800	1,49	100	100	100	93,08	229.199.800	213.339.000	12 Bulan
X.XX.0 1.1.02.0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan dan Akutansi	1 Dokumen	13.370.000	0,09	100	100	100	92,85	13.370.000	12.414.400	1 Dokumen
X.XX.0 1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			56.557.000	0,37	100	100	100	64,35	56.557.000	36.390.800	
X.XX.0 1.1.05.0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan / Bimtek yang paham	20 Orang	35.143.000	0,23	100	100	100	53,87	35.143.000	18.930.800	20 Orang
X.XX.0 1.1.05.1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 Orang	21.414.000	0,14	100	100	100	81,54	21.414.000	17.460.000	100 Orang
X.XX.0 1.1.05.1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Orang
X.XX.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.257.052.200	8,18	100	100	100	80,35	1.257.052.200	1.010.109.050	
X.XX.0 1.1.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	36.597.000	0,24	100	100	100	83,26	36.597.000	30.471.300	12 Bulan
X.XX.0 1.1.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	66.983.900	0,44	100	100	100	99,34	66.983.900	66.543.000	12 Bulan
X.XX.0 1.1.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhihnya logistik kantor	12 Bulan	317.332.800	2,07	100	100	100	95,3	317.332.800	302.425.500	12 Bulan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan
						S	R	S	R	S	R	
X.XX.0 1.1.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	45.998.500	0,3	100	100	100	99,78	45.998.500	45.899.000	12 Bulan
X.XX.0 1.1.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	139.700.000	0,91	100	100	100	96,08	139.700.000	134.220.000	12 Bulan
X.XX.0 1.1.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	650.440.000	4,23	100	100	100	66,19	650.440.000	430.550.250	12 Bulan
X.XX.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.057.744.950	6,89	100	91,09	100	96,83	1.057.744.950	1.024.207.500	
X.XX.0 1.1.07.0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah aset yang diadakan	1 Buah	493.510.000	3,21	100	100	100	99,82	493.510.000	492.610.000	1 Buah
X.XX.0 1.1.07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah aset yang diadakan	5 set	65.000.000	0,42	100	100	100	99,34	65.000.000	64.570.000	5 set
X.XX.0 1.1.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah aset yang diadakan	32 Unit	499.234.950	3,25	100	81,12	100	93,55	499.234.950	467.027.500	26 Unit
X.XX.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			971.035.200	6,32	100	100	100	88,57	971.035.200	860.056.960	
X.XX.0 1.1.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	15.935.000	0,1	100	100	100	94,45	15.935.000	15.051.300	12 Bulan
X.XX.0 1.1.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	414.000.000	2,69	100	100	100	87,96	414.000.000	364.153.260	12 Bulan
X.XX.0 1.1.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	541.100.200	3,52	100	100	100	88,87	541.100.200	480.852.400	12 Bulan
		Tersedianya makanan dan minuman	11 Bulan				0					11 Bulan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan
						S	R	S	R	S	R	
X.XX.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.018.051.492	6,63	100	100	100	95,44	1.018.051.492	971.648.540	
X.XX.0 1.1.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	324.190.000	2,11	100	100	100	87,37	324.190.000	283.254.240	12 Bulan
X.XX.0 1.1.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	594.491.492	3,87	100	100	100	99,22	594.491.492	589.836.300	12 Bulan
X.XX.0 1.1.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	99.370.000	0,65	100	100	100	99,18	99.370.000	98.558.000	12 Bulan
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			421.094.800	2,74	100	100	100	83,98	421.094.800	353.621.700	
2.18.02. 1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			300.915.000	1,96	100	100	100	82,3	300.915.000	247.671.400	
2.18.02. 1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	2Kemitraan	258.798.000	1,68	100	100	100	82,22	258.798.000	212.796.400	2 Kemitraan
2.18.02. 1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Dokumen Evaluasi	1 Dokumen	42.117.000	0,27	100	100	100	82,81	42.117.000	34.875.000	1 Dokumen

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan
						S	R	S	R	S	R	
	Penanaman Modal											
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			120.179.800	0,78	100	100	100	88,16	120.179.800	105.950.300	
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	8 Sektor	5.573.000	0,04	100	100	100	95,83	5.573.000	5.340.400	8 Sektor
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi sesuai Standar	1 Dokumen	114.606.800	0,75	100	100	100	87,79	114.606.800	100.609.900	1 Dokumen
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			977.129.600	6,36	100	100	100	88,65	977.129.600	866.168.350	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			977.129.600	6,36	100	100	100	88,65	977.129.600	866.168.350	
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah item media Promosi	6 Item	237.457.000	1,55	100	100	100	79,29	237.457.000	188.275.800	6 Item
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali	739.672.600	4,81	100	100	100	91,65	739.672.600	677.892.550	4 Kali
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			1.155.447.800	7,52	100	100	100	85,08	1.155.447.800	983.119.000	
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1.155.447.800	7,52	100	100	100	85,08	1.155.447.800	983.119.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan
						S	R	S	R	S	R	
2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Forum Fasilitasi Perusahaan	1 Kali	504.828.000	3,29	100	100	100	97,93	504.828.000	494.392.800	1 Kali
2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Fasilitasi Investor	6 Kali	14.796.000	0,1	100	100	100	81,04	14.796.000	11.990.000	6 Kali
2.18.04.1.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Survey dan tersusunnya Dokumen IKM	2 Dokumen	96.179.800	0,63	100	100	100	86,31	96.179.800	83.012.000	2 Dokumen
2.18.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi	1 Kali	539.644.000	3,51	100	100	100	72,96	539.644.000	393.724.200	1 Kali
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			688.155.900	4,48	100	100	100	67,73	688.155.900	466.092.400	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			688.155.900	4,48	100	100	100	67,73	688.155.900	466.092.400	
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau	13 Kali	151.131.000	0,98	100	100	100	30,36	151.131.000	45.886.900	13 Kali
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid tepat waktu	408 Perusahaan	343.000.900	2,23	100	100	100	83,06	343.000.900	284.908.700	408 Perusahaan



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan
						S	R	S	R	S	R	
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	300 Perusahaan	194.024.000	1,26	100	100	100	69,73	194.024.000	135.296.800	324 Perusahaan
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			192.093.800	1,25	100	100	100	87,19	192.093.800	167.483.000	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			192.093.800	1,25	100	100	100	87,19	192.093.800	167.483.000	
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	12 Bulan	192.093.800	1,25	100	100	100	87,19	192.093.800	167.483.000	12 Bulan
<b>Total</b>				<b>15.362.865.342</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99.39</b>	<b>100</b>	<b>86,17</b>	<b>15.362.865.342</b>	<b>13.239.095.696</b>	

### 3.4 Dukungan Personil

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap susunan kepegawaian yang dimiliki DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut :

Sumberdaya manusia pada DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Serjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	6	1	7	
4	Diploma Satu (D-I)	-	-	-	
5	Diploma Dua (D-II)	-	-	-	
6	Diploma Tiga (D-III)	2	2	4	
7	Diploma Empat (D-IV)		-		
8	Sarjana (S-1)	10	7	28	
9	Sarjana (S-2)	10	4	14	
10	Sarjana (S-3)	1	-	1	
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	7	-	7	*)
2	Sarjana (S-1)	13	11	24	*)
	<b>Jumlah Non PNS</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	
	<b>Jumlah Seluruh Karyawan DPMPTSP</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>74</b>	

Keterangan : \*) Pegawai Tenaga Kontrak

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	II/a Pengatur Muda	-	-	-	
2	II/b Pengatur Muda Tk.I	-	-	-	
3	II/c Pengatur	2	1	3	
4	II/d Pengatur Tk.I	5	-	5	
5	III/a Penata Muda	1	3	4	
6	III/b Penata Muda Tk.I	2	2	4	

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
7	III/c Penata	7	5	12	
8	III/d Penata Tk.I	5	2	7	
9	IV/a Pembina	2	-	2	
10	IV/b Pembina Tk.I	4	1	5	
11	IV/c Pembina Utama Tk.I	1	-	1	
12	IV/d Pembina Utama	-	-	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>29</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilihat pada tabel.

#### **Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II.A	1	-	1
3	Eselon III.A	5	1	6
4	Eselon IV.A	8	2	10
5	Fungsional Tertentu	4	2	6
6	Non Struktural / Fungsional Umum	11	9	20
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>14</b>	<b>43</b>

### **3.5 Permasalahan dan Solusi**

#### **1. Permasalahan**

Tingginya satuan harga pada DPA yang merupakan implemementasi perpres 33 pada SIPD, sehingga anggaran belanja besar. Realisasi belanja relative rendah, tetapi realisasi fisik terpenuhi. Sehingga terdapat SILPA pada anggaran tahun 2021.

#### **2. Solusi**

Koordinasi dengan TAPD terkait pengalokasian anggaran. Kalimantan Selatan termasuk daerah yang relatif aman dan kondusif sebagai tempat berinvestasi sekalipun ada beberapa permasalahan yang memerlukan penyelesaian yang arif dan bijaksana.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Promosi, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin dengan memperhatikan point-point yang dipaparkan sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dapat dikatakan berhasil, karena target yang ada dapat dicapai dengan baik.

Penyusunan LKPJ LPPD DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Strategik yang di dalamnya berisi sasaran-sasaran strategik yang harus dipertanggung jawabkan. Sasaran strategik tersebut merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh instansi pada tahun 2021 dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2021. Dengan demikian di dalam LKPJ LPPD Tahun 2021 ini DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah berusaha menjawab dan membuktikan bahwa amanah yang diberikan kepada instansi dapat dipertanggung jawabkan.

Dapat disimpulkan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu realisasi investasi dan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Adapun capaian realisasi investasi Sebesar Rp12,71 T, sedangkan capaian nilai IKM sebesar 105%. Dapat disimpulkan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan klarifikasi sangat memuaskan.

# LAMPIRAN